

**PENGARUH PENGAWASAN DINAS PENDAPATAN
DAERAH TERHADAP EFEKTIFITAS PENERIMAAN
PAJAK DI KOTA SAMARINDA**

Fachrul Rahman

**EJournal Ilmu Pemerintahan
Volume 1, Nomor 4, 2013**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengaruh Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Di Kota Samarinda

Pengarang : Fachrul Rahman

NIM : 06.56520.08746.02

Program : S1 Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul.

Samarinda, 14 November 2013

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.H. Muhammad Noor, M.Si
NIP. 19600817 198601 1 001

Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si
NIP. 19700131 19802 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 IP

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Ilmu Pemerintahan	Prodi S1 Ilmu Pemerintahan Mohammad Taufik,S.Sos.,M.Si
Volume : 1	
Nomor : 4	
Tahun : 2013	
Halaman : 1526-1535	

PENGARUH PENGAWASAN DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK DI KOTA SAMARINDA

Fachrul Rahman¹

Abstrak

Pengaruh pengawasan Dinas Pendapatan Daerah terhadap penerimaan pajak daerah di kota Samarinda. Penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat verivkatif atau mencari pengaruh sebab akibat dari dua atau lebih variable, pada jenis penelitian ini di tuntut adanya pengujian hipotesis. Tehnik pengumpulan data untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan tehnik penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan yang merupak objek penelitian dalam hal ini adalah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, Observasi, wawancara, dan kuesioner. Aanalisi Data digunakan Koefisien Korelasi Rank Spearman.

Hasil Penelitian menunjukkan berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat korelasi antara pengawasan dengan efektifitas penerimaan pajak daerah dari 37 responden yaitu rs sebesar 0,882. Apabila rs empiris dibandingkan dengan rs table yaitu $0,882 > 0,316$ dengan demikian hipotesis nol yng menyatakan tidak ada hubungan antara pengawasan dengna efektifitas penerimaan pajak daerah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda ditolak. Dapat di simpulkan bahwa hipotesis alternative diterima yang menyatakan ada hubungan antara pengawasan dengan efektifitas penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci : Peran, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kominfo, Budaya

Pendahuluan

Dalam melaksanakan Pembangunan Nasional segenap potensi dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan berdasarkan pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna meningkatkan pendapatan sosial. Dengan menitik beratkan pembangunan pada bidang ekonomi pemerintah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diperlukan dana yang

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fachrul_rahman06@gmail.com

tidak sedikit. Karena itulah pembangunan nasional memerlukan sumber penghasilan untuk dapat meningkatkan laju pertumbuhan nasional.

Dari hasil kekayaan alam yang besar, tidak sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber penghasilan bagi pembangunan. Pembangunan nasional berasal dari hasil bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan melalui hasil minyak bumi dan gas alam inilah pembangunan nasional dapat terus berlanjut.

Namun demikian dengan terus berharap pada hasil minyak bumi dan gas alam tidaklah tepat, karena semakin menipisnya kekayaan alam akibat terus dieksploitasi. Pemerintah harus segera mengantisipasinya, karena pembangunan nasional harus terus dilanjutkan. Untuk mengatasi hal inilah pemerintah harus mencari sumber penghasilan yang baru sebagai penggantinya.

Untuk itulah pemerintah sangat mengharapkan penerimaan negara dari sektor pajak, karena melalui hasil pajak inilah penerimaan Negara dapat *terus ditingkatkan* berdasarkan pada kemampuan sendiri tanpa tergantung kepada hutang luar negeri.

Pajak merupakan aset pembangunan nasional yang potensial untuk terus ditingkatkan guna menghadapi berbagai macam tantangan dimasa depan. Pajak merupakan sumber kekuatan pembangunan untuk dapat meningkatkan penerimaan Negara. Pajak merupakan sumber utama anggaran pendapatan dan belanja Negara, karena melalui pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara dengan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar dan wilayah Indonesia yang luas.

Pajak dapat meningkatkan kemandirian Negara untuk tidak bergantung kepada pinjaman luar negeri dan merupakan saran untuk pemerataan hasil pembangunan dan keadilan bagi masyarakat karena ikut serta dalam menyukseskan pembangunan melalui pajak yang dibayar oleh rakyat.

Pajak mempunyai manfaat yang besar bagi pembangunan karena selain berfungsi sebagai pengumpul dana bagi pembangunan, pajak juga berfungsi sebagai pengatur yaitu mengatur masyarakat wajib pajak untuk taat membayar pajak demi kelancaran pembangunan. Sebagai Negara berkembang Indonesia memerlukan banyak biaya bagi terciptanya cita-cita pembangunan nasional dan pemerataan pendapatan mulai dari tingkat pusat sampai kepada daerah-daerah. Dengan memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, sangat dimungkinkan dapat diperoleh pendapatan yang besar dari sektor pajak sampai kedaerah-daerah, karena wilayah yang luas inilah perlu adanya pembagian wilayah, sesuai dengan bunyi pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah yaitu pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Kebijaksanaan fiskal merupakan bagian dari kebijaksanaan pemerintah daerah dalam pembangunan dan realisasinya berupa anggaran daerah. Melalui anggaran daerah dapat dilakukan pengendalian dana sehingga sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Salah satu dari sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah yang merupakan pendapatan asli daerah. Melalui pajak daerah ini diharapkan daerah mampu mengurus rumah tangga daerahnya sendiri untuk membiayai kelangsungan roda pemerintahan termasuk untuk membiayai pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

Dalam pelaksanaannya penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan banyak memberi sumbangan bagi keuangan daerah, dalam rangka pembangunan daerah masih sulit untuk diharapkan perannya bagi pembangunan daerah. Masalah utama Pajak Daerah Kota Samarinda adalah Kurangnya intensifnya sosialisasi terhadap wajib pajak, kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan terbatasnya sarana dan prasarana.

Menurut sumber dari Dinas Pendapatan Kota Samarinda mempunyai target 1.914.290.354.877,00 dan dalam relasinya yaitu sebesar 2.068470.073.728,48 Namun hal itu masih dianggap kurang walau telah melebihi target karena masih ada saja orang atau badan perusahaan yang sangat kurang kesadarannya dalam kewajiban membayar pajak

Penerimaan pajak sudah mencapai target, tetapi belum maksimal. Hal itu terindikasi karena subjek pajak masih ada yang belum terpungut karena luasnya Daerah Kota Samarinda yang tidak terjangkau oleh wajib pajak untuk membaya pajak tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Metode Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat verivikatif atau mencari pengaruh sebab akibat dari dua atau lebih variabel, pada jenis penelitian ini dituntut adanya pengujian hipotesis.

Rumus yang digunakan untuk menganalisis korelasi Rank spearman (r_s) menurut Sidney Siegel (1992:256), adalah sebagai berikut :

$$r_s = \frac{\sum x^2 \sum y^2 - \sum d_i^2}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

$$\text{Dimana : } X^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x^2$$

$$X^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x^2$$

$$T = \frac{T^3 - t}{12}$$

Keterangan :

r_s = Koefisien Korelasi Rank Spearman

d_i^2 = Kuadrat jumlah selisih antara ranking X dan Y

N = Populasi

X = *Independent Variabel* yaitu pengawasan

Y = *Dependent variabel* yaitu efektifitas penerimaan pajak

N = Jumlah responden

T = Banyaknya himpunan yang berangka sama

T = Faktor Korelasi

12 = Bilangan Tetap

Untuk menguji tingkat korelasi antara independent variabel dan dependent variabel, dipergunakan tabel harga kritis r_s (koefisien korelasi rank spearman). Jika hitung lebih besar atau sama dengan r_s tabel pada tingkat signifikan 0,05 maka terdapat hubungan atau korelasi antara pengawasan (independent variabel) dengan penerimaan pajak daerah (dependent variabel). Sebaliknya jika r_s hitung lebih kecil dari r_s tabel pada tingkat signifikansi 0,05 maka tidak terdapat korelasi atau hubungan antara pengawasan (independent variabel) dengan penerimaan pajak daerah (dependent variabel). Selanjutnya untuk menguji koefisien dari sampel penelitian agar sampel yang diambil cukup mewakili populasi yang ada, digunakan uji menurut Sidney, Siegel (1992:263) dengan rumus sebagai berikut :

$$T = r_s \sqrt{\frac{N-2}{1-r_s^2}}$$

Menurut Riduwan (2005:174) bahwa Taraf atau signifikan dinyatakan dalam dua atau tiga desimal atau dalam persen. Lawan dari taraf signifikan ialah taraf kepercayaan atau tingkat kepercayaan. Jika taraf signifikansi sama dengan 5% atau 1% dapat disebut juga dengan taraf kepercayaan sama dengan 95% atau 99% demikian seterusnya. Pada umumnya penelitian sosial besarnya tergantung pada keinginan peneliti sebelum analisis dilakukan. Arti $\alpha = 0,05$ ialah diperkirakan 5 dari 100 kali penelitian berkesimpulan akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima atau 95% percaya bahwa kita telah membuat kesimpulan yang benar. Setelah didapatkan r_s empiris kemudian dibandingkan dengan r_s teoritis (tabel) pada n kasus pada tingkat atau taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Apabila r_s lebih besar atau sama dengan r_s tabel, maka terdapat korelasi antara hubungan pengawasan sebagai *independent variabel* dan penerimaan pajak daerah sebagai *dependent variabel* untuk n kasus dan sebaliknya apabila r_s empiris lebih kecil daripada r_s pada tingkat $\alpha = 0,05$ maka tidak terdapat korelasi antara hubungan pengawasan sebagai *independent variabel* dan efektifitas penerimaan pajak daerah sebagai *dependent variabel* dalam n kasus.

Metode Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat verivikatif atau mencari pengaruh sebab akibat dari dua atau lebih variabel, pada jenis penelitian ini dituntut adanya pengujian hipotesis.

Hasil Penelitian

Pada pembahasan ini akan disajikan data hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan materi skripsi ini melalui observasi, wawancara dan kuisioner meliputi gejala yang berkaitan dengan pengawasan maupun penerimaan pajak daerah.

Variabel Pengawasan

Untuk mengukur variabel pengawasan digunakan 8 indikator yang terbagi dalam pengawasan langsung 5 indikator dan pengawasan tidak langsung 3 indikator.

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh Kepala UPTD terhadap para bawahannya dalam melakukan pekerjaannya. Pengawasan

ini dengan mengadakan koreksi dan koordinasi yang terdiri dari indikator sebagai berikut :

a. Frekuensi Pengawasan dari Kepala Dinas DISPENDA

Hasil penelitian penulis dapat ditentukan bahwa pengawasan langsung oleh pimpinan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahan terdapat 18 jawaban sering dengan persentase 48,64%, 13 jawaban jarang dengan persentase 35,13%, 6 jawaban tidak pernah dengan persentase 16,21%.

b. Menilai hasil kerja bawahan

Hasil perhitungan penulis dapat ditemukan bahwa pengawasan langsung dari pimpinan dengan menilai hasil kerja bawahan secara langsung terdapat 19 jawaban sering dengan persentase 51,35 %, 16 jawaban jarang dengan persentase 43,24 % dan 2 jawaban tidak Pernah dengan persentase 5,40 %.

c. Mengadakan koordinasi dengan bawahan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditentukan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam melakukan pengawasan terdapat 17 jawaban sering dengan persentase 45,94 %, 15 jawaban jarang dengan persentase 40,54 % dan 5 jawaban tidak Pernah dengan persentase 13,51 %.

d. Memberi keterangan-keterangan

Hasil penelitian penulis dapat ditentukan bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pimpinan dalam melakukan pengawasan langsung terdapat 20 jawaban sering dengan persentase 54,05 %, 15 jawaban jarang dengan persentase 40,54 %, 2 jawaban tidak Pernah dengan persentase 5,40 %

e. Menerima pendapat pegawai

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat mengemukakan bahwa pengawasan langsung dalam hal pimpinan menerima pendapat pegawai terdapat 10 jawaban sering dengan persentase 27,02 %, 23 jawaban jarang dengan persentase 62,16 %, 4 jawaban tidak Pernah dengan persentase 10,08 %.

2. Pengawasan Tidak Langsung

a. Distribusi jawaban responden tentang pengawasan tidak langsung oleh pimpinan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menemukan bahwa dalam pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pimpinan terdapat 17 jawaban sering dengan persentase 45,94 %, 16 jawaban jarang dengan persentase 43,24 % dan 4 jawaban tidak Pernah dengan persentase 10,81 %.

- b. Distribusi jawaban responden tentang pengawasan tidak langsung dalam hal laporan yang diterima pimpinan dari bawahannya yang berkaitan dengan hasil kerja bawahan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menemukan bahwa dalam pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pimpinan terdapat 14 jawaban sering dengan persentase 37,83 %, 20 jawaban jarang dengan persentase 54,05 %, 3 jawaban tidak Pernah dengan persentase 8,10%.

- c. Distribusi jawaban responden tentang pengawasan tidak langsung mengenai koordinasi secara tertulis yang dilakukan.

Dari hasil penelitian penulis mengenai koordinasi secara tertulis yang dilakukan oleh kepala Dinas terdapat 19 jawaban sering dengan persentase 51,35 %, 16 jawaban jarang dengan persentase 43,24 %, 2 jawaban tidak Pernah dengan persentase 5,40 %.

3. Variabel Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Kota

- a. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kaltim Wilayah Kota Samarinda

Dari hasil penelitian penulis dalam penerimaan pajak daerah tahun 2011 diperoleh jawaban 15 responden mengatakan peningkatannya tinggi dengan persentase 40,54 %, 16 jawaban responden yang menyatakan jarang dengan persentase 43,24 %, 6 jawaban responden yang menyatakan tidak Pernah tinggi dengan persentase 16,21 %.

- b. Distribusi jawaban responden tentang Penerimaan Pajak Daerah Kota Samarinda Tahun 2011

Penerimaan pajak daerah yang diperoleh pada Kantor Dispenda Kota Samarinda untuk tahun 2011 mengalami peningkatan yang tinggi sesuai dengan data hasil penerimaan pajak daerah tahun 2011 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dari 37 responden diperoleh angka yang sama sebanyak 3 himpunan dengan t_y sebesar 637,5

Dengan mengetahui nilai $t_x =$ dan $t_y = 637,5$ maka :

$$\begin{aligned}
 X^2 &= \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x \\
 &= \frac{37^3 - 37}{12} - 127 \\
 &= \frac{50653 - 37}{12} - 127 \\
 &= \frac{50616}{12} - 127 \\
 &= 4218 - 127 \\
 &= 4091
 \end{aligned}$$

Kemudian :

$$\begin{aligned}
 Y^2 &= \frac{N^3 - N}{12} T_y \\
 &= \frac{37^3 - 37}{12} - 637,5 \\
 &= \frac{50653 - 37}{12} - 637,5 \\
 &= \frac{50616}{12} - 637,5 \\
 &= 4281 - 637,5 \\
 &= 3580,5
 \end{aligned}$$

Dengan mengetahui nilai $X^2 = 4091$ dan $Y^2 = 3580,5$ dan $d_i^2 = 918,8$ maka selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien Korelasi Rank Spearman yaitu :

$$\begin{aligned}
 r_s &= \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum d_i^2}{\sqrt{\sum X^2 \cdot \sum Y^2}} \\
 &= \frac{4094 + 3580,5 - 918,8}{\sqrt{4091 \cdot 3580,5}} \\
 &= \frac{7671,5 - 918,8}{\sqrt{14647826}} \\
 &= \frac{6752,7}{2(3827,2)} \\
 &= \frac{6752,7}{7654,4} = 0,882
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat korelasi antara pengawasan dengan efektifitas penerimaan pajak daerah dari 37 responden yaitu r_s sebesar 0,882. Apabila r_s empiris dibandingkan dengan r_s tabel pada taraf signifikansi untuk tes dua sisi dengan $N = 37$ maka terlihat bahwa harga r_s empiris lebih besar daripada r_s tabel yaitu $0,882 > 0,316$ dengan demikian hipotesis nol yang menyatakan tidak ada hubungan antara pengawasan dengan efektifitas penerimaan pajak daerah pada Kantor Dispenda Kota Samarinda ditolak. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif diterima yang menyatakan ada hubungan antara pengawasan dengan efektifitas penerimaan pajak daerah.

Kesimpulan

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda sering dilaksanakan dan berjalan dengan baik yang meliputi indikator frekuensi pengawasan dari kepala Dinas, menilai hasil kerja bawahan, mengadakan koordinasi dengan bawahan, memberikan keterangan-keterangan dan menerima pendapat pegawai.

Semakin seringnya pengawasan dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda maka efektifitas penerimaan pajak semakin meningkat pula. Berdasarkan hasil perhitungan yang penulis lakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, ternyata terdapat korelasi positif. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan statistik diperoleh koefisien korelasi rank spearman sebesar $0,882 > 0,316$ (Harga kritis r_s koefisien korelasi rank spearman untuk $N=37$).

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan hendaknya terus ditingkatkan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dan dengan tetap memperhatikan hubungan yang baik dan harmonis dengan bawahan. Instruksi yang diberikan hendaknya mudah dipahami dan dengan terbuka mau menerima pendapat pegawai atau masukan dari bawahan demi kemajuan kantor.

Pengawasan haruslah sering dilakukan oleh pimpinan agar efektifitas dalam penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik tanpa ada melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Fachrudin, Irfan, 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni, Bandung.
- Hakim, Abdul, 2001. *Statistik Deskriptif*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Handoko, Thani, 1986. *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- M. Hanafi, Mamduh, 1997. *Manajemen*, UPPAMPYKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 1991. *Perpajakan*, Edisi 3, Andi Offset, Yogyakarta.
- Munir, H dasril dkk, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, YPAPI, Yogyakarta.
- P. Siagian, Sondang, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- P. Sihaan, Marihot, 2000. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- R. Terry, George, 2000. *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Riduwan, 2005. *Dasar-dasar Statistik*, cetakan keempat, Alfabeta, Bandung.
- Samudra, Azhari, 1995. *Perpajakan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siegel, Sidney, 1992. *Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- Situmorang, Victor dan Juhir Jusuf, 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetrisno, 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Susilo, Aries, 2000. *Manajemen Perkantoran*, Surabaya Intellectual Club, Surabaya.
- Tisnawati Sule, Ernie dan Kurniawan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Kencana, Jakarta.
- Widjaja Tunggal, Amin, 1995. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta.